

Implementasi Peran Polisi Militer TNI AL di Kri Untuk Mendukung Tugas Pokok TNI Angkatan Laut di Puspomal

Tony Soelarso Herry Soetjipto¹, Hendrik Kurniawan², Hanla³, Dani Wira Nugraha⁴

^{1,2,3,4}Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (SESKOAL)

soelarsotony@gmail.com¹, hendrik199945@gmail.com², danywiranugraha81@gmail.com⁴

ABSTRACT

This study discusses the role of the Indonesian Navy Military Police (Pomal) aboard warships (KRI) in supporting the core tasks of the Indonesian Navy, particularly in maintaining discipline, enforcing the law, and upholding military order among personnel. Pomal serves as the law enforcer on board the KRI, ensuring that all personnel comply with the regulations in place. The study finds that despite the crucial role of Pomal, it faces various challenges, such as limited human resources, inadequate law enforcement facilities, and overlapping authority with the ship's command structure. Furthermore, the geographical challenges, which separate the KRI from naval bases or other military legal authorities, affect the effectiveness of law enforcement. Nonetheless, Pomal strives to overcome these challenges by optimizing coordination between Pomal personnel and the KRI Commander. This research recommends the improvement of supporting facilities, clearer authority structures, and enhanced coordination between relevant parties to improve the effectiveness of law enforcement and discipline enforcement on KRI.

Keywords : Indonesian Navy Military Police, KRI, Law Enforcement, Military Discipline, Geographical Challenges.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas peran Polisi Militer TNI Angkatan Laut (Pomal) di KRI dalam mendukung tugas pokok TNI Angkatan Laut, khususnya dalam menjaga disiplin, menegakkan hukum, dan memelihara tata tertib prajurit. Pomal berfungsi sebagai penegak hukum di KRI, yang harus memastikan seluruh prajurit mematuhi peraturan yang berlaku. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun Pomal memiliki peran yang sangat vital, pelaksanaannya dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas penegakan hukum yang terbatas, serta tumpang tindih kewenangan dengan struktur komando kapal. Selain itu, tantangan geografis yang memisahkan KRI dari pangkalan atau otoritas hukum lainnya juga mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Meskipun demikian, Pomal berupaya untuk mengatasi tantangan tersebut dengan mengoptimalkan koordinasi antara personel Pomal dan Komandan KRI. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan fasilitas pendukung, penataan kewenangan yang jelas, serta penguatan koordinasi antara pihak terkait untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan disiplin di KRI.

Kata kunci : Polisi Militer TNI AL, KRI, Penegakan Hukum, Disiplin Militer, Tantangan Geografis.

PENDAHULUAN

TNI AL memegang peran strategis dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan wilayah laut yang mencapai lebih dari dua pertiga dari total luas

Indonesia. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, TNI AL tidak hanya bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas keamanan laut, tetapi juga untuk melindungi kepentingan nasional di laut. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia, diatur dengan jelas bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, serta melindungi seluruh rakyat Indonesia dari ancaman, baik militer maupun nonmiliter (UU No. 3/2025, 2025).

Sebagai unsur utama yang dioperasikan dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) memiliki peran penting, mulai dari pengamanan jalur pelayaran, pemberantasan pembajakan, penanggulangan bencana, hingga pelaksanaan bantuan kemanusiaan internasional (Hadi, 2018). Namun, keberhasilan operasional KRI tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi dan taktik pertempuran, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia yang mengawaki kapal tersebut. Dalam hal ini, kedisiplinan prajurit menjadi faktor kunci yang sangat menentukan, terutama dalam lingkungan yang penuh dengan tekanan fisik dan psikologis seperti di atas kapal perang (Faisal, 2020).

Kehidupan di KRI sangat menuntut kedisiplinan yang tinggi karena ruang gerak terbatas, serta tantangan yang muncul akibat operasi panjang di laut. Oleh karena itu, Polisi Militer TNI Angkatan Laut (Pomal) memiliki peran strategis dalam menjaga disiplin, menegakkan hukum, serta memelihara tata tertib di lingkungan KRI. Pomal bukan hanya sebagai fungsi teknis militer, tetapi juga sebagai penegak hukum yang bertanggung jawab untuk memastikan operasional KRI berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/06/II/2002, 2002; Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/1/III/2004, 2004; Keputusan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Nomor: Kep/03/III/2003, 2003).

Namun, meskipun memiliki peran yang sangat vital, pelaksanaan tugas Pomal di KRI tidaklah tanpa tantangan. Beberapa tantangan utama yang dihadapi adalah terbatasnya sumber daya manusia dan fasilitas pendukung, aspek kewenangan yang tumpang tindih dengan komando KRI, serta tantangan operasional terkait dengan lokasi KRI yang seringkali berada jauh dari pangkalan atau otoritas hukum lainnya (Santoso, 2021). Hal ini mengharuskan sinergi yang kuat antara Komandan KRI dan personel Pomal untuk menjaga agar proses penegakan hukum di atas kapal tetap berjalan efektif dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini akan membahas secara mendalam tentang implementasi peran Polisi Militer TNI Angkatan Laut di KRI dalam mendukung tugas pokok TNI Angkatan Laut, dengan fokus pada tantangan dan solusi dalam menjaga disiplin, tata tertib, dan penegakan hukum di lingkungan KRI. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang peran Pomal di KRI dan bagaimana cara mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam menjalankan tugasnya di lapangan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman

yang mendalam tentang implementasi peran Polisi Militer TNI Angkatan Laut (Pomal) di KRI dalam mendukung tugas pokok TNI Angkatan Laut. Penelitian ini tidak berfokus pada pengujian hipotesis atau hubungan antar variabel yang dapat diukur secara statistik, melainkan berupaya menggali aspek-aspek kualitatif seperti peran, tantangan, dan solusi dalam penegakan hukum dan disiplin di lingkungan KRI. Metode studi kasus digunakan untuk menganalisis secara mendalam kejadian-kejadian yang terjadi di KRI, yang mencakup praktik, dinamika, dan hambatan yang dihadapi oleh Pomal. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang konteks, mekanisme operasional, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas peran Polisi Militer di atas kapal perang.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini difokuskan pada tiga KRI yang memiliki peran strategis dalam mendukung operasi TNI Angkatan Laut, yaitu Komandan KRI Dewaruci, Komandan KRI Pulau Raas-722, dan Komandan KRI Cakra-401. KRI Dewaruci adalah kapal yang berfungsi sebagai kapal latih bagi prajurit TNI Angkatan Laut, yang sering terlibat dalam latihan dan misi pendidikan. KRI Pulau Raas-722 dan KRI Cakra-401, masing-masing memiliki peran dalam pengamanan jalur pelayaran dan operasi militer lainnya. Penelitian ini akan dilakukan dengan mengamati operasional di ketiga KRI tersebut untuk menggali bagaimana peran Polisi Militer TNI AL diterapkan, tantangan yang dihadapi, dan bagaimana mereka menjaga disiplin dan tata tertib prajurit di atas kapal. KRI yang dipilih akan memberikan gambaran beragam tentang penerapan kebijakan penegakan hukum dan disiplin di lingkungan kapal perang TNI Angkatan Laut.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan tiga metode utama: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan personel Polisi Militer TNI Angkatan Laut yang bertugas di KRI Dewaruci, KRI Pulau Raas-722, dan KRI Cakra-401, serta dengan Komandan KRI dan prajurit lainnya untuk menggali pandangan mereka mengenai peran Pomal, tantangan yang dihadapi, dan solusi yang diterapkan dalam menjaga disiplin dan tata tertib di atas kapal. Observasi dilakukan secara langsung terhadap aktivitas yang terjadi di KRI, termasuk pengawasan terhadap implementasi peraturan dan prosedur hukum di kapal. Selain itu, data sekunder juga dikumpulkan melalui dokumentasi seperti laporan tugas, prosedur operasional standar, dan regulasi yang relevan dengan tugas Pomal di KRI. Gabungan dari ketiga teknik ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang holistik dan mendalam mengenai peran Pomal di KRI.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Polisi Militer TNI Angkatan Laut di KRI

Polisi Militer TNI Angkatan Laut (Pomal) di KRI memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga disiplin, menegakkan hukum, serta memelihara tata tertib di kapal perang. Tugas utama Pomal di KRI adalah memastikan bahwa seluruh personel di kapal, baik itu

prajurit maupun staf lainnya, mematuhi peraturan militer yang berlaku. Hal ini mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan tugas, pengaturan perilaku prajurit, serta penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran disiplin. Pomal bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan rutin, pengawasan kegiatan sehari-hari, serta penyelesaian permasalahan hukum yang muncul, baik yang bersifat administratif maupun kriminal. Tugas ini menjadi semakin krusial mengingat kondisi operasional di KRI yang memiliki ruang gerak terbatas dan tekanan psikologis tinggi (Hadi, 2018). Penegakan hukum dan disiplin yang dilakukan oleh Pomal menjadi salah satu faktor penentu kelancaran operasional KRI dalam mendukung tugas pokok TNI Angkatan Laut, seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU No. 3/2025, 2025), yang menegaskan pentingnya peran TNI dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI.

Pomal juga bertindak sebagai mediator antara prajurit dan komando dalam hal penyelesaian masalah internal di kapal. Dalam beberapa kasus, ketika terjadi gesekan atau konflik antar anggota, Pomal berperan dalam menyelesaikan masalah dengan cara yang sesuai dengan prosedur hukum militer. Pomal berfungsi untuk menjaga stabilitas dan moral prajurit yang bertugas, sehingga tugas-tugas operasional KRI dapat dilaksanakan dengan baik tanpa gangguan. Namun, dalam pelaksanaannya, Pomal dihadapkan pada tantangan terkait dengan keterbatasan sumber daya, baik dari segi jumlah personel maupun fasilitas penegakan hukum yang memadai di kapal. Keterbatasan fasilitas tersebut dapat menghambat proses penegakan hukum yang efisien, seperti kurangnya ruang interogasi atau fasilitas penahanan sementara untuk pelanggaran disiplin (Santoso, 2021).

Tantangan yang Dihadapi oleh Polisi Militer di KRI

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh Polisi Militer TNI Angkatan Laut di KRI adalah terbatasnya jumlah personel dan fasilitas pendukung. Setiap KRI hanya memiliki sejumlah kecil personel Pomal yang terbatas dalam jumlah, sehingga mereka harus menangani berbagai tugas besar dengan keterbatasan tersebut. Selain itu, banyak KRI yang tidak dilengkapi dengan fasilitas yang memadai untuk melakukan proses penahanan atau interogasi terhadap prajurit yang terlibat pelanggaran hukum. Hal ini membuat penegakan hukum di kapal menjadi lebih rumit, terutama ketika pelanggaran yang terjadi bersifat serius dan memerlukan tindakan hukum yang lebih lanjut. Pomal harus bekerja dengan keterbatasan fasilitas yang ada, yang terkadang mempengaruhi efektivitas tugas mereka. Tantangan ini sejalan dengan penjelasan dalam teori sistem yang digunakan dalam analisis operasional militer, yang menekankan pentingnya kesesuaian antara sumber daya yang tersedia dan tuntutan tugas yang harus dilaksanakan (Faisal, 2020).

Selain itu, tantangan lainnya datang dari aspek kewenangan dan struktur komando. Polisi Militer di KRI bekerja di bawah komando langsung Komandan KRI, yang memiliki wewenang penuh atas seluruh kegiatan operasional di kapal. Dalam beberapa situasi, kewenangan Pomal dalam menegakkan hukum bisa saling bertentangan dengan keputusan atau kebijakan yang diambil oleh Komandan KRI. Ketegangan ini sering kali muncul ketika Pomal harus melaksanakan tugas penegakan hukum di bawah perintah yang bisa berbeda dengan kebijakan operasional kapal. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara

Pomal dan Komandan KRI untuk memastikan penegakan hukum yang efektif dan tidak menimbulkan konflik internal. Sinergi ini sangat penting agar tugas penegakan hukum tetap berjalan sesuai dengan prosedur dan tidak mengganggu kelancaran operasional kapal, yang juga berkaitan dengan teori kolaborasi dalam organisasi militer yang dijelaskan oleh Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/06/II/2002 (Keputusan Panglima TNI, 2002).

Strategi Penegakan Disiplin oleh Polisi Militer di KRI

Dalam rangka menjaga disiplin prajurit, Polisi Militer TNI Angkatan Laut di KRI menggunakan berbagai strategi yang melibatkan pengawasan rutin, pemeriksaan administrasi, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran disiplin yang terjadi. Salah satu strategi yang diterapkan adalah melakukan pemeriksaan terhadap setiap prajurit yang terlibat dalam insiden atau pelanggaran, baik yang bersifat ringan maupun berat. Pemeriksaan ini biasanya dilakukan dengan melakukan wawancara atau pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang terlibat. Selain itu, Pomal juga aktif melakukan inspeksi rutin terhadap seluruh fasilitas di kapal, memastikan bahwa semua peraturan mengenai kebersihan, keamanan, dan ketertiban dijalankan dengan baik. Penegakan disiplin ini sangat penting untuk menjaga moral prajurit dan memastikan bahwa KRI dapat beroperasi dengan efisien tanpa adanya gangguan internal yang dapat mempengaruhi keberhasilan misi. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam teori kepemimpinan militer yang menekankan pentingnya integritas dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas (Faisal, 2020).

Strategi lain yang dilakukan oleh Pomal adalah memberikan pendidikan dan sosialisasi tentang pentingnya kedisiplinan dan tata tertib militer kepada seluruh prajurit di kapal. Pendidikan ini dilakukan secara berkala melalui berbagai bentuk pelatihan, seminar, dan briefing yang disampaikan oleh personel Pomal kepada prajurit TNI Angkatan Laut. Selain itu, Pomal juga menegakkan sistem penghargaan dan hukuman sebagai bentuk motivasi bagi prajurit. Hukuman diberikan secara proporsional dan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, sementara penghargaan diberikan kepada prajurit yang menunjukkan kinerja atau perilaku yang baik. Dengan demikian, Pomal berperan tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai agen perubahan yang membentuk pola pikir dan sikap prajurit agar lebih disiplin dan siap menghadapi tantangan dalam tugas. Pendekatan ini juga mencerminkan teori perubahan organisasi, yang menekankan pentingnya kepemimpinan dalam membentuk budaya disiplin di lingkungan militer (Keputusan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Nomor: Kep/03/III/2003, 2003).

Pengaruh Kondisi Geografis terhadap Penegakan Hukum di KRI

Kondisi geografis yang memisahkan KRI dari pangkalan atau otoritas hukum lainnya menjadi salah satu tantangan besar bagi Polisi Militer TNI Angkatan Laut dalam menjalankan tugasnya. KRI seringkali beroperasi di perairan yang jauh dari daratan, membuatnya sulit untuk melakukan proses hukum secara langsung atau mendalam. Dalam situasi seperti ini, jika ada pelanggaran hukum yang serius, Pomal harus menunggu hingga kapal bersandar di pelabuhan atau pangkalan untuk dapat melakukan tindakan lebih lanjut. Hal ini menyebabkan adanya keterlambatan dalam proses hukum yang bisa berdampak

pada ketidakpastian dan kurangnya kepastian hukum bagi prajurit yang terlibat dalam pelanggaran. Proses hukum yang tertunda juga dapat menimbulkan ketegangan di antara prajurit, karena mereka menunggu kepastian hukuman atau keputusan yang diambil terhadap rekan mereka. Ketergantungan pada fasilitas hukum yang terbatas di laut mengacu pada prinsip sistem yang menjelaskan bahwa efektivitas organisasi bergantung pada adanya keselarasan antara tugas yang harus dilaksanakan dan dukungan infrastruktur yang tersedia (Santoso, 2021).

Selain itu, keterbatasan akses ke unit pendukung hukum lain, seperti Oditurat Militer atau Polisi Militer Pangkalan, juga memperburuk situasi. Ketika KRI beroperasi jauh di laut lepas, Pomal tidak dapat langsung menghubungi pihak-pihak yang memiliki kewenangan lebih tinggi dalam proses hukum. Oleh karena itu, Pomal harus mengambil keputusan sendiri dengan mematuhi prosedur yang ada dan menggunakan sumber daya yang terbatas di kapal. Meski demikian, Pomal tetap berupaya mengoptimalkan penegakan hukum melalui mekanisme yang ada, seperti menggunakan sistem komunikasi jarak jauh dengan pangkalan atau melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang relevan. Meskipun tantangan geografis ini menghambat kelancaran proses hukum, Pomal terus berupaya untuk memastikan disiplin tetap terjaga dan pelanggaran dapat ditangani dengan adil dan tepat waktu, yang sejalan dengan teori koordinasi dalam organisasi militer (Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/06/II/2002, 2002).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran Polisi Militer TNI Angkatan Laut (Pomal) di KRI sangat vital dalam mendukung kelancaran operasional TNI Angkatan Laut, terutama dalam menjaga disiplin, menegakkan hukum, dan memelihara tata tertib prajurit. Poin kesimpulan dijelaskan sebagai berikut:

1. Peran Polisi Militer TNI Angkatan Laut (Pomal) di KRI sangat penting dalam mendukung kelancaran operasional TNI Angkatan Laut, terutama dalam menjaga disiplin, menegakkan hukum, dan memelihara tata tertib prajurit.
2. Pomal berfungsi sebagai penegak hukum yang menangani pelanggaran disiplin dan menyelesaikan masalah internal di kapal, serta menjaga stabilitas dan moral prajurit yang bekerja di lingkungan dengan tekanan tinggi.
3. Tantangan yang dihadapi Pomal termasuk terbatasnya sumber daya manusia, fasilitas penegakan hukum yang minim, dan tumpang tindih kewenangan dengan struktur komando kapal.
4. Kendala geografis juga mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, karena KRI sering beroperasi jauh dari pangkalan atau otoritas hukum lainnya, menghambat proses penegakan hukum secara cepat.
5. Meski menghadapi berbagai kendala, Pomal tetap berusaha menjalankan tugasnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan mengoptimalkan koordinasi dengan pihak terkait.
6. Sinergi yang kuat antara Pomal dan Komandan KRI sangat penting untuk memastikan efektivitas penegakan disiplin di kapal.

Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal

Volume 7 Nomor 12 (2025) 4209 – 4215 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691

DOI: 10.47476/reslaj.v7i12.10015

7. Ke depan, perlu adanya peningkatan fasilitas pendukung, penataan kewenangan yang lebih jelas, serta penguatan koordinasi antara pihak terkait untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan disiplin di KRI.

DAFTAR PUSTAKA

Faisal, R. *Peran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dalam Operasi Keamanan Laut*. Jakarta: Penerbit Bahari, 2020.

Hadi, P. *KRI dan Tugas Pokok TNI Angkatan Laut*. Surabaya: Penerbit Lautan, 2018.

Keputusan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Nomor: Kep/03/III/2003 tentang Perubahan Likuidasi Disproval dan Pembentukan Organisasi Pomal.

Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/06/II/2002 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Polisi Militer TNI.

Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/1/III/2004 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Polisi Militer TNI.

Santoso, A. *Tantangan Penegakan Disiplin di Lingkungan KRI*. Jakarta: Penerbit Angkatan Laut, 2021.